

**PELAKSANAAN FUNGSI BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA PADANG**

**Eko Aditya, 24151061, Program Studi S1 Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas,
Tahun 2026**

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun meskipun telah disertai dengan ancaman pidana yang berat, pada kenyataannya tindak pidana tersebut masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimanakah hambatan yang dialami oleh Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan fungsi Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf yang menyelenggarakan perencanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, analisis dan evaluasi, serta dukungan administrasi dan logistik operasi kepolisian. Pelaksanaan fungsi tersebut diawali dengan penyusunan rencana operasi berdasarkan analisis situasi keamanan, data kriminalitas, informasi intelijen, dan laporan masyarakat. Selanjutnya, Bag Ops melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, dan satuan fungsi lainnya untuk mendukung pelaksanaan operasi, melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap jalannya operasi agar sesuai dengan prosedur, melaksanakan analisis dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi operasi berikutnya, serta memberikan dukungan administrasi dan logistik guna menunjang kelancaran operasi. 2) Hambatan yang dialami oleh Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan satuan fungsi dalam pelaksanaan operasi, keterbatasan data dan informasi intelijen yang akurat sebagai dasar penentuan sasaran operasi, sulitnya pembuktian terhadap jaringan peredaran gelap narkotika yang bersifat terorganisasi, keterbatasan dukungan anggaran serta sarana dan prasarana operasional, serta rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Bagian Operasi Polri, Tindak Pidana, Penyalahguna Narkotika.

**IMPLEMENTATION OF THE PADANG CITY POLICE (POLRESTA)
OPERATIONS DIVISION'S FUNCTIONS IN UNCOVERING NARCOTICS
ABUSE OFFENSES WITHIN ITS JURISDICTION**

*Eko Aditya, 24151061, Bachelor of Laws (S1) Study Program,
Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities, Dharma Andalas University,
Year 2026*

ABSTRACT

Narcotics abuse is strictly regulated under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; however, despite the imposition of severe criminal penalties, such offenses continue to occur across various regions in Indonesia. The research questions addressed in this study are: how does the Operations Division of the Padang City Police (Polresta Padang) carry out its functions in uncovering narcotics abuse offenses, and what obstacles does the division encounter in doing so? The research employs an empirical-juridical method. Data were obtained through literature reviews and interviews. The results indicate that: 1) The Operations Division of Polresta Padang carries out its functions regarding narcotics abuse cases in accordance with its duties as a staff unit responsible for planning, coordination, control, supervision, analysis and evaluation, as well as providing administrative and logistical support for police operations. This process begins with the formulation of an operational plan based on security situation analysis, crime data, intelligence information, and public reports. Subsequently, the Operations Division coordinates with the Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba), Intelligence and Security Unit (Satintelkam), Public Order Unit (Satsamapta), and other functional units to support the operation; it controls and monitors the operation to ensure procedural compliance, conducts analysis and evaluation to inform future operational strategies, and provides the necessary administrative and logistical support to ensure the operation runs smoothly. 2) The obstacles faced by the Operations Division of the Padang City Police (Polresta Padang) in uncovering narcotics abuse offenses include suboptimal coordination among law enforcement agencies and functional units during operations; a lack of accurate data and intelligence to serve as a basis for selecting operational targets; difficulties in gathering evidence against organized narcotics trafficking networks; limited budgetary support and operational facilities; and low public legal awareness and participation in providing information regarding narcotics-related crimes.

Keywords: *National Police Operations Division, Criminal Offense, Narcotics Abuser.*